

# **STUDI TENTANG IMPLEMENTASI PROGRAM BELAJAR SEPANJANG HAYAT DI INDONESIA**

**Disampaikan pada  
Seminar Internasional Pendidikan Luar Sekolah,  
yang diselenggarakan oleh Prodi PLS-SPS UPI,  
Bandung Tanggal 29 November 2010.**

**Oleh  
Achmad Hufad, Jhoni R Pramudia, Sardien Supariatna**

## **Abstrak**

Program belajar sepanjang hayat memberikan kesempatan belajar secara wajar dan luas kepada setiap orang sesuai dengan perbedaan minat, usia, dan kebutuhan belajarnya secara belajar kelompok (*group learning*), dan perorangan (*individual learning*), melalui ragam media massa, ragam tempat belajar dan bentuk belajar. Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) meriview dan menganalisis konseptualisasi belajar sepanjang hayat dalam kebijakan pendidikan dan penjabarannya ke dalam perencanaan, strategi, dan program yang menuju aksi; (2) mengumpulkan kasus-kasus yang menggambarkan "good practice" implementasi program belajar sepanjang hayat di lapangan; (3) mendeskripsikan dampak program belajar sepanjang hayat terhadap pemberdayaan individu dan masyarakat dilihat dari konteks sosial dan ekonomi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belajar sepanjang hayat merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan pendidikan di Indonesia. Temuan ini terungkap dalam beberapa produk kebijakan pendidikan yang mengkonseptualisasi belajar sepanjang hayat menjadi prinsip dan asas penyelenggaraan pendidikan, baik pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal dalam berbagai jenis, jenjang dan program pendidikan. Konseptualisasi dan pengungkapannya dapat dicermati dalam beberapa produk kebijakan pendidikan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Penjabaran belajar sepanjang hayat dalam perencanaan, strategi, dan program aksi dapat dilihat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) Pendidikan di tingkat pusat dan daerah.

Kata kunci: Studi Implementasi, Program Belajar Sepanjang Hayat

## **Pendahuluan**

Urgensi berkembangnya belajar sepanjang hayat di Indonesia, dilatarbelakangi oleh kondisi nyata (*real conditons*) masyarakatnya yang



sepanjang hayat (Program Pendidikan Kesetaraan, Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan dan Pemberdayaan Perempuan, Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Kecakapan Hidup). Dengan responden : (1)Kepala Dinas Pendidikan Provinsi (2)Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota (3)Kepala SKB (4)Tutor Keaksaraan Fungsional; Pendidikan Perempuan, Lifeskills (5).Penge nmmnblola program (Keaksaraan Fungsional, Pendidikan Perempuan, Lifeskills (6)Lulusan program pendidikan Keaksaraan Fungsional; Pendidikan Perempuan, Lifeskills (7)Tokoh masyarakat

Lokasi penelitian dikonsentrasikan di tiga wilayah di lima provinsi yang dipandang merepresentasikan karakteristik nasional, yaitu Indonesia wilayah barat, tengah, dan timur. Wilayah barat diwakili oleh Provinsi Sumatera Selatan (Palembang), Jawa Barat (Kabupaten/Kota Sukabumi) dan Jawa Tengah (Kab/Kota Semarang). Wilayah tengah diwakili oleh Provinsi Kalimantan Barat (Pontianak), dan wilayah timur diwakili oleh Provinsi Sulawesi Selatan (Makassar).

Produk kebijakan yang dianalisis, yaitu: (1)Kebijakan Nasional berupa UU, PP dan Permen; (2) Kebijakan Provinsi, berupa PRIMD, Perda, Renstra SKP, SK Disdik; (3) Kebijakan Kabupaten/Kota, berupa RPJMD, Perda, SK Pemkab/Pemkot, Renstra SKPD, SK Dsidik.

Fokus dan Aspek yang Diteliti mencakup (1) Konseptualisasi program belajar sepanjang hayat dalam kebijakan pendidikan, dan interpretasinya ke dalam perencanaan, strategi, dan program yang menuju aksi; (2) Kasus-kasus yang menggambarkan "good practice" dalam implementasi program belajar sepanjang hayat di lapangan; (3) Dampak program belajar sepanjang hayat terhadap pemberdayaan individu dan masyarakat dilihat dari konteks sosial dan ekonomi.

## **Hasil dan Pembasan**

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, penelitian tentang implementasi program belajar sepanjang hayat dilakukan di lima provinsi di Indonesia. Di kelima provinsi tersebut, penelitian difokuskan pada program-program belajar sepanjang hayat (baca pendidikan nonformal) yang diselenggarakan pada satuan-satuan pendidikan nonformal, khususnya program-program yang diselenggarakan pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Untuk memperkuat dan memperkaya data yang diperlukan, terutama data yang berkaitan dengan produk kebijakan pendidikan sepanjang hayat di daerah, maka pada setiap provinsi, penelitian diperluas target subjeknya ke Kantor Dinas Pendidikan Provinsi, Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan Kantor Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

Fakta empirik yang sesungguhnya, di Indonesia praktek belajar sepanjang hayat kurang begitu dikenal dan jarang digunakan sebagai terminologi program pendidikan. Masyarakat dan institusi penyelenggara pendidikan lebih akrab dengan istilah pendidikan nonformal atau lebih dikenal lagi istilah pendidikan luar sekolah. Program-program belajar sepanjang hayat dimaksud, pada kenyataannya telah lama dilaksanakan di Indonesia dalam jenis dan bentuknya yang beragam.



## **B. Analisis Hasil Penelitian**

Atas dasar pertimbangan anggaran yang kurang memadai dan waktu yang relative terbatas, analisis terhadap hasil penelitian ini konsisten difokuskan pada tiga dimensi pokok, yaitu: (1) Konseptualisasi belajar sepanjang hayat dalam konteks kebijakan pendidikan di Indonesia; (2) Kasus-kasus yang menggambarkan "good practice" implementasi program belajar sepanjang hayat; (3) Dampak program belajar sepanjang hayat terhadap pemberdayaan individu dan masyarakat dilihat dari konteks sosial dan ekonomi.

Kebijakan pendidikan yang dianalisis adalah kebijakan-kebijakan pendidikan yang secara langsung bersinggungan, berkaitan, dan bahkan bersinergi dengan prinsip-prinsip belajar sepanjang hayat, baik pada level nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Contoh-contoh praktek belajar sepanjang hayat yang baik dianalisis dari kasus-kasus pada setiap lokasi penelitian di lima provinsi. Pemilihan dan penetapan contoh "good practice" dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sanggar Kegiatan Belajar.

Analisis dampak program belajar sepanjang hayat terhadap pemberdayaan individu dan masyarakat dilihat dari konteks sosial dan ekonomi, dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap lulusan program belajar sepanjang hayat pada semua jenis dan jenjang pendidikan, terutama lulusan yang sudah bekerja dan secara ekonomi mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan sebelum mengikuti program belajar sepanjang hayat.

### **1. Konseptualisasi Belajar Sepanjang Hayat dalam Kebijakan Pendidikan di Indonesia**

Sampai saat ini, Indonesia belum memiliki satupun payung kebijakan yang langsung mengatur belajar sepanjang hayat. Berbeda dengan Jepang yang sejak tahun 1990 sudah memiliki Undang-undang *Lifelong Learning Promotion*, yang merupakan kunci reformasi pendidikan dan administratif di Jepang. Konseptualisasi belajar sepanjang hayat dalam produk kebijakan pendidikan di Indonesia, masih berupa penggalan-penggalan yang bersifat parsial dan dalam bentuknya yang beragam. Ada yang secara eksplisit menggunakan terminologi program pendidikan atau belajar sepanjang hayat, selebihnya menggunakan terminologi lain yang biasa digunakan dalam pendidikan nonformal.

Analisis dokumen yang dilakukan terhadap produk kebijakan pendidikan, baik pada level nasional, provinsi, dan kabupaten/kota difokuskan pada aspek-aspek berikut:

- a. Prinsip Belajar Sepanjang Hayat
- b. Jenis Program Belajar Sepanjang Hayat
- c. Peran Pemerintah, Lembaga Non Pemerintah, Masyarakat dan Kemitraan



- 2) Dalam menyelenggarakan pendidikannya selalu melibatkan peserta didik dimulai sejak kegiatan perencanaan, pelaksanaan, proses, hasil serta sampai pada pengaruh kegiatan belajar yang dilaksanakan tersebut.
- 3) Memiliki tujuan sesuai dengan kebutuhan kehidupan individu yang dilaksanakan didalam proses pendidikannya.

#### **b. Jenis Program dan Satuan Pendidikan**

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 26 ayat 3, mengklasifikasi program pendidikan nonformal ke dalam beberapa program, meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Uraian dalam Pasal 26 ayat 3 mengenai jenis program belajar sepanjang hayat menjadi arah pembangunan nasional, terutama pembangunan pendidikan. Hal ini dinyatakan secara eksplisit dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2004-2009). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ini menetapkan pendidikan sebagai salah satu prioritas dalam agenda utama pembangunan nasional.

Dalam RPJM ini dirumuskan arah program penguatan kebijakan Depdiknas yang terkait dengan pendidikan sepanjang hayat, yang kemudian menjadi kegiatan pokok pemerintah. Program-program tersebut antara lain:

- c. Pendidikan Anak Usia Dini
- d. Perluasan akses PAUD (PAUD) – TK, RA, KB, TPA
- e. Perluasan akses pendidikan wajib belajar pada jalur nonformal
- f. Pengembangan program Pendidikan Nonformal
- g. Perluasan akses pendidikan keaksaraan bagi penduduk usia >15 tahun
- h. Pendidikan Kecakapan Hidup
- i. Perluasan pendidikan kecakapan hidup
- j. Perluasan dan peningkatan mutu akreditasi program pendidikan nonformal
- k. Pemanfaatan ICT sebagai media pembelajaran jarak jauh
- l. Pengembangan Budaya Baca

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ini kemudian dijabarkan lagi ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Departemen Pendidikan Nasional yang berdurasi setiap tahun. Dan lebih spesifik lagi dijabarkan dalam program strategis Direktorat Jendral Pendidikan Nonformal dan Informal, yakni Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Kesetaraan, Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Adil Gender, dan Pendidikan Keakapan Hidup.

Kesadaran akan pentingnya pendidikan sepanjang hayat pada daerah-daerah yang menjadi lokasi penelitian menjadikan bervariasinya program belajar sepanjang hayat yang dikembangkan. Hal ini tidak terlepas dari peran serta para pembuat kebijakan di daerah yang melaksanakan sesuai dengan acuan kebijakan penyelenggaraan pendidikan non formal dari pusat. Kesadaran ini kemudian diaktualisasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Keberagaman program pada dasarnya memiliki karakteristik yang





bahkan sebagian besar instansi tidak mengetahui keberadaan pendidikan sepanjang hayat secara jelas. Instansi-instansi hanya mengetahui PSH sebatas penyelenggara Program Kejar Paket A,B,C itupun setelah adanya gejala hasil Ujian Nasional yang mengharuskan bagi peserta yang gagal untuk ikut persamaan Kejar Paket.

Pada level provinsi yang memberikan pembinaan yaitu Dinas Pendidikan di tingkat Provinsi, sedangkan untuk tingkat Kabupaten yang memberikan pembinaan yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten. Pada tingkat kecamatan pelaksana teknis dalam pembinaan yaitu Penilik Pendidikan baik pendidikan persekolahan maupun Pendidikan Luar Sekolah. Dalam menjalankan tugas penilik PLS dibantu oleh Tenaga Lapangan Dikmas (TLD).

Institusi perguruan tinggi belum terlibat dalam pembinaan secara intensif. Keterlibatan perguruan tinggi hanya sebatas satu dua orang, itupun, keterlibatannya baru bersifat personal, tidak secara kelembagaan. Kondisi ini dimungkinkan terjadi akibat kurangnya koordinasi dan adanya semacam krisis kepercayaan antar lembaga perguruan tinggi dengan birokrasi pemerintah yang bermuara pada sikap saling menunggu, bukan bersikap pro aktif.

Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan (NGO) dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber belajar, pelaksana, dan pengguna pendidikan (Pasal 54, ayat 1 dan 2).

Terkait dengan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan sepanjang hayat, Pasal 55 ayat 1 dan 2 mengungkapkan bahwa masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan social, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.

Keterlibatan masyarakat masih terbatas pada permintaan saran, ide-ide atau gagasan dalam perintisan dan penyelenggaraan program-program pendidikan sepanjang hayat yang dikembangkan oleh PKBM ataupun program pendidikan sepanjang hayat lainnya. Keterlibatan lebih jauh, terutama dalam bentuk struktur kepengurusan sebagai pembina, atau penasehat masih kurang.

Kontribusi yang diberikan baru berupa saran-saran tentang program yang diselenggarakan dan materi yang seyogyanya dikaji didalam program satuan pendidikan sepanjang hayat. Hingga saat ini potensi pembelajaran yang terdapat di lingkungan masyarakat, yang secara umum telah dimanfaatkan diantaranya berupa sarana yang ada, seperti; rumah-rumah atau lahan milik tokoh masyarakat atau pengurus (RT/RW), kantor dan ruangan serba guna di lingkungan RW atau sarana yang dimiliki oleh kelurahan atau desa.

Di masa depan diharapkan program yang diselenggarakan lebih beragam dan mampu menjangkau lebih banyak warga masyarakat yang membutuhkan. Pengembangan program pendidikan di PKBM ke depan diharapkan lebih diutamakan, mendapat dukungan dari masyarakat secara penuh, dan harus didukung oleh sarana prasarana dan dana yang memadai dari pemerintah.

Kemitraan dalam pengembangan pendidikan sepanjang hayat dapat dinilai strategis untuk mengidentifikasi persoalan yang terjadi dan merumuskan model kerjasama yang harmonis dan strategik diantara para pelaku program.



- a. Program pendidikan anak usia dini (PAUD) bermutu yang mampu “melejitkan” kecerdasan anak, membentuk kesiapan belajar lebih lanjut, serta melaksanakan pelayanan dengan jangkauan sasaran yang semakin meluas, merata, dan berkeadilan.
- b. Program pendidikan keaksaraan bermutu yang mampu meningkatkan kompetensi keaksaraan pada semua tingkatan (dasar, fungsional, dan lanjutan) bagi penduduk buta aksara dewasa secara meluas, adil dan merata untuk mendorong perbaikan kesejahteraan dan produktivitas penduduk, dan ikut serta dalam mendukung perbaikan peringkat IPM.
- c. Program pendidikan kesetaraan bermutu dan relevan yang mampu meningkatkan kecakapan hidup, termasuk kesiapan kerja, produktivitas dan kemandirian peserta didik, serta dalam rangka mendukung keberhasilan penuntasan Wajib Dikdas 9 Tahun dan perluasan akses pendidikan menengah nonformal.
- d. Kelembagaan kursus dan kursus para-profesi yang berorientasi pada peningkatan kecakapan hidup (PKH) yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat serta pelayanan yang semakin meluas, adil dan merata, khususnya bagi penduduk miskin dan penganggur terdidik, dapat bekerja dan/atau berusaha secara produktif, mandiri, dan profesional.
- e. Terwujud pendidikan yang berkeadilan gender melalui peningkatan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pendidikan serta mendukung upaya pencegahan diskriminasi, trafficking, dan tindak kekerasan sebagai wujud perlindungan HAM.
- f. Masyarakat pembelajar sepanjang hayat melalui peningkatan budaya baca serta penyediaan bahan-bahan bacaan yang berguna baik bagi aksarawan baru maupun anggota masyarakat lainnya agar memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang relevan bagi peningkatan produktivitas mereka.
- g. Terwujud peningkatan kapasitas kelembagaan, sarana dan prasarana yang memadai, serta ketenagaan yang profesional, dan satuan pendidikan nonformal yang terakreditasi agar mampu menjangkau sasaran yang semakin luas, adil dan merata serta dapat memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang terus berkembang.

Anggaran atau Pembiayaan pendidikan nonformal menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat (Pasal 48, Ayat 1). Sedangkan sumber pembiayaan diatur dalam Pasal 47, Ayat (1) yang berbunyi bahwa “Pemerintah, Pemerintah daerah, dan Masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Ketenagaan program dan satuan pendidikan nonformal diatur secara eksplisit dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 28, ayat (1) yang mengharuskan pendidik memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal 29, ayat (1) mengatur kualifikasi akademik, latar belakang pendidikan tinggi, dan sertifikat profesi guru untuk Pendidikan Anak Usia Dini. Pasal 30, ayat (7) menjelaskan mengenai kualifikasi pendidik/tutor pada program pendidikan kesetaraan (Paket A, B, dan C). Dilanjutkan pada Pasal 33, ayat (1)

yang mengharuskan tenaga pendidik pada lembaga kursus dan pelatihan keterampilan memiliki kualifikasi dan kompetensi minimum yang dipersyaratkan.

Mengenai tenaga kependidikan pada program dan satuan pendidikan nonformal, diuraikan dalam Pasal 35, ayat (1), bagian (f) dan (g). Bagian (f) mengatur tentang tenaga kependidikan pada program kesetaraan (Paket A, B, dan C) yang sekurang-kurangnya terdiri dari pengelola kelompok belajar, tenaga administrasi, dan tenaga perpustakaan. Sedangkan pada bagian (g) diatur tentang tenaga kependidikan lembaga kursus dan pelatihan keterampilan yang menuntut adanya pengelola atau penyelenggara, teknisi, sumber belajar, pustakawan, dan laboran. Adapun kualifikasi untuk tenaga kependidikan nonformal diatur dalam Pasal 37, ayat (1).

Gambaran selengkapnya mengenai ketenagaan belajar sepanjang hayat pada jalur pendidikan nonformal dapat dilihat pada uraian berikut:

- a. Tenaga pendidik PNFI meliputi
  - 1) Pamong belajar UPT P2PNFI dan BPPNFI, UPTD BPKB/SKB
  - 2) Fasilitator desa intensif (FDI)
  - 3) Tutor KF
  - 4) Tutor Paket A, B, C
  - 5) Tenaga pendidik dan pengasuh PAUD
  - 6) Tenaga pendidik dan penguji praktek kursus
  - 7) Narasumber teknis KBU
  - 8) Tenaga pendidik PNF lainnya (instruktur magang)
- b. Tenaga Kependidikan PNFI yaitu :
  - 1) Penilik
  - 2) Tenaga Lapangan Dikmas (TLD)
  - 3) Pengelola PKBM
  - 4) Pengelola Kelompok Belajar
  - 5) Pengelola Kursus
  - 6) Pengelola TBM
  - 7) Pengelola PAUD
  - 8) Tenaga kependidikan satuan PNF lainnya (pengelola KBU/Magang, laboran, pustakawan, dsb).

**e. Substansi Program Pembelajaran dan Sasaran Langsung**

Dalam Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Program Pendidikan Kesetaraan (Program Paket A, Paket B, dan Paket C) disebutkan mengenai cakupan kelompok mata pelajaran sebagai berikut:

- a. Agama dan Akhlak Mulia
- b. Kewarganegaraan dan Kepribadian
- c. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- d. Estetika
- e. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan

Kurikulum program belajar sepanjang hayat dikembangkan prinsip-prinsip berikut:

- a. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungan

- b. Beragam dan terpadu
- c. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
- d. Relevan dengan kebutuhan kehidupan
- e. Menyeluruh dan berkesinambungan
- f. Belajar sepanjang hayat
- g. Seimbang antara kepentingan nasional dan daerah
- h. Tematik
- i. Partisipatif

Kandungan program belajar sepanjang hayat yang dikembangkan oleh pemerintah, lembaga non pemerintah, dan masyarakat selalu mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Terkait dengan kondisi masa lalu, kondisi saat ini dan kebutuhan di masa datang sesuai dengan umur, kemampuan, potensi lingkungan dan kebutuhan peserta didik dan masyarakat.
- b. Bersifat holistik dan komprehensif serta memenuhi kebutuhan hidup seperti kebutuhan dasar, rasa aman, sosial, dan aktualisasi diri.
- c. Memberdayakan peserta didik agar mampu mengembangkan diri dan menghadapi tantangan.
- d. Mengembangkan keterampilan fungsional dan kepribadian profesional sehingga dapat mewujudkan insan Indonesia yang kooperatif, demokratis, berbudaya, dan kompetitif.
- e. Mampu mengembangkan lima kecerdasan: spiritual, emosional, sosial, intelektual dan kinestetik.

Materi belajar pada program belajar sepanjang hayat dikembangkan oleh beberapa unsur sebagai berikut-:

- a. Pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional dan/atau telah mengikuti pelatihan fungsional di bidang pendidikan nonformal.
- b. Lembaga penyelenggara pendidikan nonformal yang telah memiliki legalitas formal dari Dinas Pendidikan (Subdin Pendidikan Nonformal).
- c. Departemen Pendidikan Nasional (Ditjen PNFI dan Balitbang) yang membidangi pengembangan kurikulum.
- d. Badan Standar Nasional Pendidikan (Standar Isi)

Cara mengembangkan materi belajar pada program belajar sepanjang hayat adalah:

- a. Dikembangkan sendiri oleh pendidik dan tenaga kependidikan serta lembaga penyelenggara pendidikan nonformal
- b. Bekerjasama dengan satuan yang relevan dalam mengembangkan materi belajar sepanjang hayat.
- c. Melibatkan perguruan tinggi, para profesional dan para pakar pendidikan nonformal.
- d. Melakukan kolaborasi antarinstansi pemerintah, instansi pemerintah dengan lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha/industri.

#### **f. Metodologi Pembelajaran dan Mekanisme Penyampaian**

Program belajar sepanjang hayat diselenggarakan dalam berbagai modus, bentuk, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta system

penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan (UU No. 20 Tahun 2003; Pasal 31, Ayat 3).

Metode yang dipergunakan dalam program belajar sepanjang hayat disesuaikan dengan substansi materi dari program yang dikembangkan. Pada program kesetaraan metode yang dipergunakan relatif sama dengan pendidikan formal hanya memiliki beberapa perbedaan yaitu lebih banyak metoda yang dipergunakan untuk belajar mandiri karena waktu belajar yang relatif lebih singkat apabila dibandingkan dengan pendidikan formal. Adapun yang memiliki kekhasan adalah metoda yang dikembangkan untuk pendidikan keaksaraan fungsional, dimana pembelajaran dilaksanakan secara *tematik* sehingga warga belajar tidak merasa bosan dan jenuh. Sedangkan metoda yang dipergunakan untuk program *life skill* lebih banyak mempergunakan demonstrasi dan simulasi untuk materi pelajaran praktek dan ceramah untuk mata pelajaran teori.

Mengenai standar proses belajar sepanjang hayat, diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 3 tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan.

Proses penyelenggaraan program belajar sepanjang hayat disarankan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Dalam pelaksanaannya program belajar sepanjang hayat memerlukan bahan belajar berupa media cetak dan perpustakaan yang lengkap
- 2) Proses pembelajaran menjadi optimal jika didukung oleh pengalaman belajar datang dari kebutuhan/ mandiri
- 3) Pembelajaran pada program belajar sepanjang hayat di suatu tempat akan berlangsung, jika kelompok-kelompok belajarnya, dibantu oleh tutor dan orang lain yang memiliki pengalaman
- 4) Sarana yang dikelola dengan baik
- 5) Program pendidikan dan pembelajaran yang terstandar
- 6) Adanya tempat untuk belajar/ruang pertemuan
- 7) Keanekaragaman sumber belajar dan kemudahan terhadap akses sumber-sumber belajar
- 8) Adanya tenaga tutor yang qualified.
- 9) Adanya kurikulum yang merepresentasikan kebutuhan belajar dan sesuai dengan perkembangan zaman.
- 10) Penggunaan metode dan teknik pembelajaran yang bervariasi
- 11) Media dalam bentuk bahan cetak karena tidak memerlukan listrik dan alat bantu lain
- 12) Inti pembelajaran adalah transfer dan transformasi dengan mengacu pada pola just in time dan just in case.
- 13) Penggunaan media teknologi informatika komunikasi yang tersedia dimasyarakat sangat diperlukan. Dan dapat direkomendasikan untuk dijadikan salah satu media unggul.
- 14) Proses pembelajaran dilakukan secara bervariasi melalui:
  - Belajar mandiri,
  - Belajar dengan tatap muka/*classroom based*,
  - Belajar melalui magang

- Belajar secara berkelompok.
- 15) Proses disesuaikan dengan latar belakang peserta didik, jenis program yang dipelajari (mandiri, tatap muka, kelompok)
  - 16) Proses yang berbasis: induktif, tematik dan berbasis kecakapan hidup

#### **g. Jaringan antara Pembelajaran Formal, Nonformal, dan Informal**

Belajar sepanjang hayat merupakan proses kontinum dari elemen-elemen yang saling berkaitan (*interdependent*), yang dilandasi oleh kebutuhan individu dalam pendidikan sepanjang hidupnya. Proses belajar sepanjang hayat yang merentang dari pendidikan formal, non formal hingga informal.

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 menegaskan perlunya penyelenggaraan program belajar sepanjang hayat bersinergi antara pembelajaran formal, nonformal, dan informal. Dalam Pasal 13 Ayat (1) dijelaskan bahwa “Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya”. Kedudukan ketiga jalur tersebut dalam perspektif undang-undang jelas setara dan tidak menunjukkan hirarki kualitas, dari mulai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 26 Ayat (6) bahwa “Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

Hal-hal lain yang berkenaan dengan jaringan (*linkage*) antara pendidikan formal, nonformal, dan informal adalah program pindah jalur. Program pindah jalur dalam rangka kesetaraan pendidikan diatur secara lengkap pada UU No 20 tahun 2003 dan Peraturan pemerintah No 19 Tahun 2005. Dari dua perundangan ini selanjutnya dijabarkan pada Permendiknas No 22 tentang Standar Isi dan No 23 tentang Standar Kompetensi Lulusan. Pasal utama yang terdapat pada Undang-Undang yaitu pasal 12 Ayat (1) hak peserta didik untuk pindah antar jalur pendidikan. Seperti ditekankan pula Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara.

Untuk menjamin kebermaknaan dan pemenuhan prinsip keadilan serta mutu pindah jalur dalam rangka pendidikan kesetaraan secara khusus diatur pada permendiknas di atas. Pada dasarnya Peraturan Menteri yang pertama mengatur mengenai syarat minimal dan arah kompetensi dari setiap jenjang, sedangkan Peraturan Menteri yang kedua menekankan pada kompetensi termasuk kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh semua satuan dan jenjang pendidikan. Idealnya standar isi maupun standar kompetensi lulusan harus berimbang pada semua jalur.

Dalam pelaksanaannya program pindah jalur dan kesetaraan belum bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya. Berdasarkan hasil penelitian, egosektoral dan kinerja masing-masing satuan menjadikan hambatan untuk terjadinya pindah jalur. Kelemahan yang terjadi pada satuan pendidikan sering demikian tertutup sehingga tidak memungkinkan untuk mendapatkan perbaikan dari sub sistem lain. Sebaliknya keunggulan yang dimiliki oleh sub sistem tidak mendapatkan pengembangan sehingga terjadi kemandegan dalam mengembangkan keunggulan





standar nasional pendidikan. Sedangkan akreditasi pendidikan non formal adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan suatu satuan pendidikan non formal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh badan independenn yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan.

Mengenai evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi program dan satuan pendidikan nonformal dijabarkan dalam Bab XVI. Evaluasi program pendidikan nonformal eksplisit dalam Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59. Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan. Akreditasi program dan satuan pendidikan nonformal tertuang dalam Pasal 60, yang menyebutkan bahwa akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah, dan atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Setifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi. Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai bentuk pengakuan terhadap prestasi belajar, sedangkan sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi.

## **2. Contoh Implementasi Program Belajar Sepanjang Hayat**

Seiring dengan kebijakan pemerintah pusat yang menaikkan alokasi dana untuk pendidikan, semua daerah yang dijadikan objek studi juga melakukan upaya yang sama. Hal ini bisa dilihat dari beberapa kebijakan, di antaranya:

*Pertama*, Pemberantasan buta aksara, di mana pemerintah pusat menargetkan bahwa pada akhir tahun 2009 angkat buta aksara dewasa secara nasional diperkirakan sebesar 5%. Untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga melakukan hal yang sama dengan cara meningkatkan alokasi dana melalui APBD provinsi/kabupaten/kota.

*Kedua*, Peningkatan alokasi dana untuk penuntasan wajar dikdas 9 tahun, di mana pemerintah pusat meluncurkan berbagai program, baik yang dilaksanakan pada jalur pendidikan formal maupun pendidikan nonformal. Pada pendidikan formal dikembangkan program pemberian beasiswa miskin, pembangunan unit sekolah baru, unit gedung baru, sekolah satu atap, guru kunjung, di samping program peningkatan mutu pendidikannya. Sementara pada pendidikan nonformal dilaksanakan program pendidikan keaksaraan yang lebih fleksibel dengan berbagai pendekatan yang lebih berpihak kepada peserta didik.

*Ketiga*, Peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan. Seiring dengan persyaratan kualifikasi akademik dan persyaratan administratif, maka tenaga pendidik (terutama pada jalur pendidikan formal) dilakukan sertifikasi secara bertahap. Sementara pada jalur pendidikan nonformal, dilakukan dengan cara yang berbeda. Hal ini selain sistem ketenagaan yang belum mapan seperti pada pendidikan formal, tenaga pendidikan pada jalur pendidikan nonformal memiliki karakteristik yang lebih variatif, baik dilihat dari kualifikasi pendidikan

(akademik) maupun pengalaman melakukan pembelajaran. Untuk memberikan wawasan yang diperlukan oleh tenaga pendidik pada jalur pendidikan nonformal biasanya dilakukan melalui pelatihan-pelatihan jangka pendek (*short course*), baik yang dilakukan dengan biaya APBN (dilaksanakan oleh UPT Pusat yang ada di daerah, misalnya P2PNFI dan BP-PNFI) maupun yang dibiayai oleh APBD (dilaksanakan oleh Pusat Pelatihan Tenaga Teknis dan Fungsional Daerah atau UPTD, BPKB dan SKB). Di samping itu upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik pada jalur pendidikan nonformal ini dilaksanakan pula oleh perguruan tinggi melalui program pengabdian kepada masyarakat dan oleh kelompok-kelompok profesi, misalnya Himpunan Tenaga Pendidik dan Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (Himpaudi), Forum Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (Forum PKBM), Ikatan Pamong Belajar Indonesia, dan ikatan profesi lainnya.

Di Provinsi Jawa Barat, program pendidikan nonformal (terutama untuk pendidikan keaksaraan) mendapatkan dana alokasi yang cukup besar dari APBD provinsi, sekitar 65 milyar rupiah. Jumlah ini meningkat apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Demikian pula halnya dengan Provinsi Kalimantan Barat, program pendidikan nonformal (terutama untuk pendidikan keaksaraan) mendapatkan dana alokasi yang cukup besar dari APBD provinsi, sekitar 35 milyar rupiah pada tahun 2008, dan menjadi 55 milyar rupiah pada tahun 2009 ini. Kenyataan serupa terjadi juga di tiga provinsi lain yang menjadi lokasi penelitian, yaitu Provinsi Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Jumlah dana tersebut semakin besar karena didukung oleh sumber dana APBD kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat keselarasan arah dan gerak pembangunan yang diprogramkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Komitmen utama dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi maupun Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Program pendidikan yang mendukung pendidikan sepanjang hayat, terutama pendidikan nonformal di daerah tidak berbeda dengan program pendidikan yang telah dirumuskan di pemerintahan pusat. Bahkan dana-dana yang dialokasikan untuk pendidikan nonformal hampir seluruhnya dijadikan sebagai dukungan terhadap program pendidikan yang dikembangkan oleh pemerintah pusat. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa pendidikan secara program masih menganut sistem kesamaan gerak dan langkah dengan pusat meskipun pendanaan untuk pembangunannya dibagti sesuai dengan kemampuan setiap daerah.

Beberapa contoh implementasi program belajar sepanjang hayat yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan nonformal adalah sebagai berikut:

**a. Program Sekolah Lapang Akselerasi Ekonomi Produktif (SL-AEP) di Kabupaten Sukabumi**

SL-AEP adalah program pendidikan yang melayani warga masyarakat berlatar belakang (Pra-KS dan KS 1) untuk memperoleh pelayanan pendidikan keterampilan ekonomi produktif, pendidikan kesetaraan, pendidikan keaksaraan,





Program di sekolah ini mencoba menawarkan pendidikan bermutu dan murah. Bermutu bukan sekadar peringkat tinggi, tapi yang lebih penting mereka memberdayakan peserta didik dalam menghadapi realitas kehidupan sekitar. Metode pembelajaran SMP QT terfokus kepada peserta didik, bukan guru. Dalam pendekatan seperti ini, anak-anak diberi kebebasan untuk belajar dari mana saja, apa saja, dan tidak harus di kelas. Semuanya diserahkan kepada anak didik tanpa terkungkung satu sumber belajar.

Jika kita berkunjung ke sekolah ini, akan terlihat sebagian besar tempat belajar kosong pada jam pelajaran. Ternyata para murid sedang asyik belajar di sawah, ladang, atau pinggir sungai. Di dalam maupun di luar kelas, guru yang biasa dipanggil pendamping atau fasilitator dilarang mengarahkan proses pembelajaran. Pendamping hanya boleh mendengar dan menjaga agar kegiatan kelas tetap kondusif.

### **c. Program Pendidikan Kesetaraan bagi Masyarakat Daerah Terpencil Melalui Pemanfaatan Radio Komunitas di Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat**

Program ini dilatarbelakangi oleh adanya kendala yang cukup mengganggu kinerja penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan yakni sulitnya memaksimalkan layanan pendidikan bagi kelompok-kelompok sasaran yang kurang memiliki kesempatan untuk akses secara langsung terhadap program-program pendidikan non formal, khususnya program Paket A dan Paket B. Padahal di satu sisi, komunitas ini memiliki *kebutuhan belajar yang cukup tinggi*, terutama kaitannya dengan peningkatan kualifikasi pendidikan minimal SLTP dan bahkan SMA yang dipersyaratkan oleh perusahaannya tempat bekerja. Beberapa hal yang menjadi persoalan keterbatasan akses adalah sebagai berikut:

- 1) Jarak yang cukup jauh antara domisili peserta didik dengan institusi penyelenggara pendidikan non formal, akibat faktor geografis yang kurang menguntungkan;
- 2) Sebagian besar sasaran didik adalah pekerja dan pencari nafkah (petani, wiraswasta, dan buruh pabrik) yang pulangnye baru sore hari,
- 3) Waktu belajar pada siang hari yang berbenturan dengan waktu bekerja atau mencari nafkah, kurang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran secara tatap muka (*face to face*).

Pemanfaatan Radio Komunitas Pemanfaatan radio komunitas untuk perluasan pendidikan kesetaraan ini secara umum bertujuan untuk membantu warga belajar atau kelompok masyarakat yang tidak terlayani kebutuhan belajarnya pada jalur non formal secara reguler-konvensional. Dalam konteks yang lebih spesifik, kegiatan ini bertujuan untuk:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan kesetaraan bagi masyarakat terpencil dan atau masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap program-program pendidikan non formal.
- 2) Memberikan layanan pendidikan dan pembelajaran program Paket A setara Sekolah Dasar (SD) yang mengacu pada kurikulum dan standar kompetensi yang ditetapkan.

3) Memberikan layanan pendidikan dan pembelajaran program Paket B setara SLTP yang mengacu pada kurikulum dan standar kompetensi yang ditetapkan.

Karakteristik sasaran program pembelajaran Paket A dan Paket B melalui pemanfaatan radio komunitas ini adalah masyarakat yang memiliki keterbatasan akses, akibat kondisi geografis yang relatif terpencil, keterbatasan waktu, biaya, dan budaya (*culture*).

Kelompok sasaran seluruhnya berada di kawasan Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat. Mata pencaharian masyarakat sasaran sebagian besar adalah petani, buruh/karyawan, ibu rumah tangga, dan kelompok sasaran lainnya yang tidak terlayani kebutuhan belajarnya pada jalur pendidikan formal. Secara spesifik kelompok sasaran pembelajaran melalui radio komunitas ini adalah:

- (1) *Drop out (DO)* Sekolah Dasar
- (2) Putus Jenjang SD
- (3) *Drop out (DO)* SLTP

Kurikulum pembelajaran pendidikan kesetaraan melalui radio komunitas ini mengikuti rasionalisasi sebagai berikut:

#### **Program Paket A:**

Berdasarkan kurikulum yang berlaku, jam belajar program Paket A adalah 680 jam/tahun atau 180 hari/tahun atau 3,8 jam/hari atau 34 minggu/tahun dengan muatan 30 SKS/semester, dengan durasi setiap 1 jam pelajaran adalah 40 menit. Melihat komposisi waktu yang ditetapkan, waktu efektif pembelajaran melalui radio setiap semesternya adalah 340 jam/semester atau, 90 hari/semester atau, 17 minggu/semester, dengan alokasi SKS sebanyak 30 SKS dalam durasi 40 menit setiap 1 jam pelajaran, dan mengudarakan materi pembelajaran selama 3,8 jam/hari.

#### **Program Paket B:**

Merujuk pada kurikulum yang berlaku, jam belajar program Paket B adalah 816 jam/tahun atau 180 hari/tahun atau 4,5 jam/hari atau 34 minggu/tahun dengan muatan 34 SKS/semester dengan durasi setiap 1 jam pelajaran adalah 40 menit. Berdasarkan komposisi waktu yang ditetapkan di atas, waktu efektif pembelajaran melalui radio setiap semesternya adalah 408 jam/semester atau, 90 hari/semester atau, 17 minggu/semester, dengan alokasi SKS sebanyak 34 SKS dalam durasi 40 menit setiap 1 jam pelajaran, dan mengudarakan materi pembelajaran selama 4,5 jam/hari.

#### **d. Program Pendidikan Keaksaraan Berbasis Kecakapan Hidup pada PKBM Inayah di Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala Kota Makasar.**

Visi dan misi PKBM Inayah masih ditunjukkan dengan penyelenggaraan program PNF, yang sampai dengan tahun 2009 ini, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Inayah tetap eksis mengembangkan pendidikan di masyarakat. Bahkan, PKBM yang dipimpin oleh Idham, S.E ini memiliki prestasi

yang cukup membanggakan. Salah satu prestasi yang diraihinya adalah juara dua PKBM ditingkat Sulawesi Selatan. Idham, mengungkapkan, eksistensinya dalam melaksanakan semua program PNF di PKBM tidak terlepas dari dukungan Dinas Pendidikan yang senantiasa memberikan segala bentuk dukungan termasuk memberikan pembinaan-pembinaan yang berkesinambungan terhadap program PNF di PKBM Inayah.

Salah satu program unggulan PKBM ini adalah program pendidikan keaksaraan, karena disamping mampu menarik minat masyarakat untuk terlibat dalam proses pembelajaran, program ini juga cukup memiliki keunggulan dalam hal jenis keterampilan VCO yang diintegrasikan.

Jumlah warga belajar pendidikan keaksaraan (sampai dengan bulan Maret 2009) yang masih aktif dalam proses pembelajaran pendidikan keaksaraan tingkat dasar sebanyak 40 orang yang dibiayai oleh dana dekonsentrasi Dinas Pendidikan Kota Makasar. Sedangkan jumlah warga belajar pendidikan keaksaraan tingkat lanjutan, yang masih berpartisipasi dalam aktivitas pembelajarannya, sebanyak 20 orang, yang juga pengelolaannya didanai oleh dan dekonsentrasi Kota Makasar tahun anggaran 2009, serta dikelola oleh 4 orang pendidik/tutor, dengan kualifikasi pendidikan 1 orang S1 dan 3 orang lulusan SMA. Namun, keempat orang tutor tersebut pernah mengikuti pelatihan tutor pendidikan keaksaraan, baik yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kota Makasar maupun oleh BP-PNFI Makasar. Sehingga, secara umum dapat dikatakan mereka telah memahami teknis, prinsip dan metode pembelajaran pada program pendidikan keaksaraan

Substansi pembelajaran untuk pendidikan keaksaraan tingkat dasar, yang dijadikan muatan program belajar (tahun 2009) adalah yang berkenaan dengan kesehatan lingkungan yang dielaborasi dengan pendidikan vokasional, pembuatan VCO (Virgin Coconut Oil) dan pembuatan kue-kue kering sebagai rasi belajarnya. Sedangkan, program belajar bagi warga belajar pendidikan keaksaraan tingkat lanjutan, adalah menjahit dan pengemasan serta teknik pemasaran VCO.

Pembelajaran bagi warga belajar tingkat dasar dilakukan 1 kali dalam seminggu yaitu setiap hari minggu, pukul 15.30 s/d 17.00 WITA. Sedangkan untuk warga belajar tingkat lanjutan, pembelajarannya dilakukan setiap hari Sabtu dengan waktu dan alokasi jam yang sama dengan durasi pembelajaran pendidikan keaksaraan tingkat lanjutan. Mengenai metode pembelajaran yang dominan dipergunakan oleh tutor dalam pendidikan keaksaraan pada kedua tingkatan ini, adalah metode SAS, Transliterasi, Belajar dari bahan bacaan sekitar dan praktek hasil belajar.

Nara sumber teknis yang terlibat dari pembelajaran keaksaraan berbasis kecakapan hidup ini, adalah tutor, pengelola dan warga belajar yang mempunyai kompetensi terhadap jenis keterampilan life skills tertentu, yang menjadi kebutuhan belajar warga belajar PNF di PKBM Inayah.

Biaya penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan berbasis kecakapan hidup adalah bersumber dari biaya mandiri pengelola PKBM. Hal ini disebabkan, sampai dengan 2009 ini, sejak dari awalnya PKBM Inayah berdiri, belum pernah mendapatkan bantuan dana atau bantuan lainnya dari Dinas Pendidikan Provinsi, Kota bahkan dari BP-PNFI Makasar sekalipun. Dari sini, dapat terlihat kemandirian PKBM Inayah dalam kontribusi dan partisipasinya dalam program PNF di Kota Makasar.

Secara umum, sasaran strategis penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan di PKBM Inayah, adalah para ibu rumah tangga yang: a) tidak mempunyai keahlian dalam bidang keterampilan vokasional, b) ibu rumah tangga yang buta aksara dan c) pemuda/i yang tidak sempat mengecap bangku SMP atau SMA, dikarenakan alasan ekonomi keluarga, d) pemuda/i yang belum mempunyai pekerjaan (pengangguran).

Program ini memiliki dampak langsung terhadap beberap hal, diantaranya: (1) adanya peningkatan dalam kemampuan Calistung (WB Pendidikan keaksaraan); (2) mampu meningkatkan ekonomi keluarga, karena sudah mampu memproduksi dan menjual hasil belajar (terutama VCO) sendiri; (3) lebih aktif berpartisipasi dalam aktivitas kehidupan bermasyarakat; (4) melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas/perguruan tinggi swasta; (5) mendapatkan pekerjaan di perusahaan-perusahaan, serta (6) membuka usaha mandiri di rumahnya masing-masing.

#### **e. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Kelompok Bermain Bina Ilmu di Ungaran Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah.**

Program Pendidikan Anak Usia dengan besaran satuan pendidikan kelompok bermain dan taman penitipan anak. Namun demikian upaya perluasan di setiap daerah semakin dikembangkan, misalnya dengan memperkuat posyandu untuk kemudian ditingkatkan menjadi Pos PAUD, penguatan lembaga sosial lainnya yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan anak usia dini; contoh paling mutakhir dari penyelenggaraan program PAUD adalah program PAUD yang diselenggarakan oleh PKBM Bina Ilmu di Kabupaten Semarang. Program PAUD Bina Ilmu termasuk program yang cukup baik dan bermutu, mengingat kelengkapan dari beberapa komponen pendukungnya, dilihat dari perspektif pengelolanya, pamong belajar/fasilitator/tutor, program belajar, sarana dan prasarana, hasil belajar, warga belajar, raga belajar, kelompok belajar, panti belajar, ketersediaan dana belajar.

Kelompok bermain merupakan wadah pembelajaran pengembangan potensi dalam upaya pembentukan kepribadian dasar manusia yang handal guna menciptakan kualitas sumber daya manusia. Pelaksanaan program kelompok bermain ini didasarkan atas pertimbangan bahwa usia 2-4 tahun merupakan masa peralihan dari masa bayi ke masa kanak-kanak. Masa usia dini merupakan masa yang sangat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan anak. Anak usia dini selalu serba ingin tahu, banyak bertanya, keras kepala, aktif, selalu ingin, mencoba hal-hal yang baru menurut dorongan yang timbul dalam dirinya, asuhan, bimbingan. Dukungan dan komunikasi dari orang tua yang baik merupakan hal yang sangat diperlukan anak dalam usia dini.







- c. Memiliki keterampilan memadai dalam membantu meningkatkan pendapat Keluarga.
- d. Memiliki kemampuan untuk mengorganisasi dan memobilisasi; partisipasi dalam organisasi komunitas perempuan.

Substansi materi pada program pendidikan dan pemberdayaan perempuan meliputi:

- a. Bidang Keterampilan
  - 1) Pengenalan alat
  - 2) Pengenalan Teknik-teknik, dan cara merias pengantin
  - 3) Pengenalan karakteristik setiap orang
  - 4) penguatan Materi dan pengulangan
  - 5) Kegiatan Praktek
- b. Bidang Umum-Integratif
  - 1) Gender dalam kehidupan rumah tangga
  - 2) Pengelolaan ekonomi keluarga berwawasan gender
  - 3) Gender dan kehidupan demokrasi dalam keluarga
  - 4) Hak Asasi Manusia (HAM) dalam keluarga
  - 5) Hak-hak Perempuan, bahaya trafficking dan Anak
- c. Bidang Penunjang
  - 1) Pelatihan fasilitator dan nara sumber teknis
  - 2) Pelatihan pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif

**h. Program Kursus Wirausaha Desa dan Kursus Wirausaha Kota (KWD & KWK).**

Program ini merupakan program yang mengarahkan peserta didik untuk mengenal, memahami, dan memanfaatkan sumber-sumber yang ada di lingkungan sekitar untuk kemudian dijadikan sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan berekonomi. Program ini merupakan program yang bersumber dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk mengembangkan sikap dan keterampilan kewirausahaan di pedesaan maupun di perkotaan. Program ini berjalan hampir semua provinsi di Indonesia, termasuk pada lima provinsi lokasi penelitian.

Program kursus ini penyelenggaraannya sudah cukup melembaga dan sebenarnya sudah lebih banyak yang berdiri sendiri (*establish*). Program ini diselenggarakan oleh lembaga-lembaga yang sudah lama berdiri di masyarakat. Namun demikian untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan output peserta didik, pemerintah memberikan rambu-rambu penyelenggaraan dan pembinaan, baik dalam pendanaan maupun substansi program. Keseluruhan program tersebut terbingkai dalam satuan pendidikan di antaranya adalah PKBM, Yayasan, Lembaga Kursus dan Pelatihan, Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Organisasi Peduli Perempuan, dan lainnya.

**i. Program Kelompok Belajar Usaha Budidaya Ikan Jaring Terapung di Pinggiran Sungai Kapuas Kota Pontinak Provinsi Kalimantan Barat**

Program kelompok belajar usaha yang dikembangkan di di PKBM Sejahtera Kota Pontinak adalah budidaya ikan melalui pengelolaan jaring terapung di pinggiran Sungai Kapuas. Program ini berjalan cukup baik dan efektif sehingga

memperoleh simpati luas dari masyarakat. Warga masyarakat sekitar sungai yang pada awalnya pesimistis, setelah melihat perkembangan dan keberhasilan kelompok ini menjadi ikut simpatik dan bergabung dengan kelompok ini.

Dilihat dari perkembangan anggotanya, KBU ini mengalami perkembangan yang cukup pesat. Dari jumlah anggota yang hanya 20 orang, kini sudah mencapai 200 orang lebih dengan pendapat setiap bulannya mencapai 2 s.d 5 juta rupiah. Agar pengelolaan, pemeliharaan, dan pemasaran hasil budidaya ikan ini berjalan baik dan terorganisir, maka dibentuklah asosiasi petani ikan sungai Kapuas yang beranggotakan 200 orang lebih. Produk budidaya ikan dipasarkan ke beberapa pasar swalayan dan para pedagang kecil di sekitar Kota Pontianak dan Kalimantan Barat.

### **3. Dampak Program Belajar Sepanjang Hayat terhadap Pemberdayaan Individu dan Masyarakat Dilihat dari Konteks Sosial dan Ekonomi.**

Salah satu indikator keberhasilan program pendidikan nonformal adalah meningkatnya kebermaknaan diri dalam kehidupan dirinya, keluarganya dan lingkungan masyarakatnya. Kebermaknaan diri berarti memiliki kemampuan untuk menjadi diri sendiri, bersifat mandiri dan memiliki kemampuan untuk menentukan jalan hidupnya sendiri.

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan pada lulusan, diperoleh keterangan bahwa seluruh lulusan lembaga pendidikan merasakan bahwa program belajar sepanjang hayat memberikan makna dalam kehidupannya. Makna tersebut dapat dilihat pada;

1. Perubahan pengetahuan dan kemampuan yang dapat dijadikan dasar untuk melanjutkan kepada pendidikan lanjutan (terutama untuk pendidikan keaksaraan).
2. Perubahan orientasi hidup yang lebih fungsional (terutama untuk pendidikan keaksaraan).
3. Perubahan berekonomi dan berkehidupan yang layak, terutama untuk lulusan program kursus
4. Perubahan pengetahuan tentang hak-hak dasar hidup dan kehidupan dalam berkeluarga, bermasyarakat, dan berbangsa (terutama pendidikan pemberdayaan perempuan).

Pada umumnya pencapaian yang diperoleh tersebut terjadi karena adanya keselarasan antara tujuan yang ingin dicapai oleh para peserta didik, di mana pada umumnya tujuan sangat dipengaruhi oleh jenis program pendidikan nonformal yang dikembangkan. Pada program pendidikan kesetaraan, peserta didik pada umumnya bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan yang setara dengan pendidikan formal dan sangat berharap untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Peserta didik pada program pendidikan keaksaraan lebih fokus bertujuan untuk memiliki kemampuan dalam membaca, menulis, dan berhitung secara fungsional dalam kehidupan sehari-hari, di samping peningkatan ketrampilan hidup yang lebih fungsional. Tujuan peserta didik mengikuti program pendidikan kursus (KPP, KWD, KWK), pada umumnya bertujuan untuk mempercepat mendapatkan pekerjaan dan ekonomi.

Kebermaknaan program belajar sepanjang hayat menjadi dasar program ini diminati oleh peserta didik. Kebermaknaan tersebut dilihat dari empat hal, yaitu;

*Pertama*, kesesuaian program dengan kebutuhan belajar yang dirasakan. Program belajar sepanjang hayat yang selama ini diikuti selain menyajikan program reguler juga menyisipkan program untuk keahlian yang diharapkan. Pada beberapa kasus, program pendidikan keaksaraan dan kesetaraan tidak terlepas dari program pendidikan kecakapan hidup yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

*Kedua*, kemudahan (fleksibilitas) untuk diperoleh dan ketidakkakuan. Program belajar sepanjang hayat yang dikembangkan pada lembaga pada umumnya dapat diakses oleh peserta didik kapan saja tanpa mengenal batas waktu yang kaku, meskipun pada umumnya penyelesaian program memiliki batasan waktu. Hal ini memudahkan peserta didik dalam menyesuaikan waktu belajar yang dimiliki.

*Ketiga*, pada umumnya program belajar sepanjang hayat dapat dijangkau lebih mudah dan lebih dekat. Ada kalanya program belajar sepanjang hayat dilaksanakan di tempat tinggal peserta didik, terutama untuk program pendidikan keaksaraan dan program pendidikan perempuan, sementara program yang membutuhkan dukungan sarana yang lebih lengkap biasanya dilaksanakan di lembaga tersebut atau pada lembaga mitra yang memiliki sarana yang dibutuhkan.

*Keempat*, berorientasi kepada penyelesaian masalah yang dihadapi masa kini dan mempersiapkan kemampuan untuk masa yang akan datang. Hal ini ditandai dengan banyaknya peserta didik yang merasa terbantu dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi saat ini terutama yang berkaitan dengan pemerolehan pekerjaan yang didasarkan atas ketrampilan tertentu atau persoalan-persoalan sosial budaya lainnya.

Kebermaknaan di atas berdampak pada sikap dan perilaku serta harapan yang lebih positif dari peserta didik, baik yang menyangkut diri sendiri maupun yang menyangkut sistem sosial budaya. Sikap, perilaku dan harapan tersebut dapat dilihat dari tiga dimensi, yaitu;

*Pertama*, perubahan pada kebiasaan diri untuk menjadi pembelajar secara terus menerus. Pada umumnya peserta didik memiliki kecenderungan untuk memanfaatkan hasil belajar yang diperoleh pada program belajar sepanjang hayat melalui pembiasaan pada kehidupan sehari-hari. Hal ini terutama terjadi pada pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan.

*Kedua*, perubahan dalam cara pandang terhadap lingkungan sekitar. Peserta didik pada program belajar sepanjang hayat memiliki rasa percaya diri untuk dapat hidup dan menatap masa depan yang lebih baik. Pada umumnya mereka merasa dapat menemukan peluang untuk dapat hidup lebih baik atas dasar kemampuan yang dimiliki melalui program belajar sepanjang hayat.

*Ketiga*, perubahan pandangan terhadap masa depan yang lebih optimis. Perubahan ini ditandai dengan keinginan untuk menjadi lebih baik, melahirkan dan memiliki generasi yang lebih baik, dan menjadi pendorong terhadap anggota keluarga dan masyarakat lain untuk memanfaatkan program belajar sepanjang hayat.

Program belajar sepanjang hayat juga pada gilirannya harus mampu memberikan efek positif dalam berekonomi. Berdasarkan studi yang dilakukan belum ditemukan secara pasti nilai pertambahan ekonomi secara kuantitatif yang

dapat dihitung. Namun demikian, lulusan program pendidikan nonformal mengaku bahwa terjadi perubahan positif dalam kehidupan berekonomi. Hal ini ditandai dengan beberapa indikator kunci, yaitu;

- 1) Diperolehnya pekerjaan baru, meskipun pada beberapa kasus pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan yang dilakukan secara swadaya atau berkelompok dalam sistem pembimbingan dari lembaga pendidikan. Kasus tersebut nampak pada usaha diversifikasi agroindustri di Jawa Barat, di mana lulusan pendidikan nonformal diwadahi dalam kelompok usaha ekonomi produktif.
- 2) Meningkatkan pendapatan ekonomi dalam pekerjaan yang sama yang diakibatkan oleh kepuasan pelanggan dan kecepatan dalam menyelesaikan pekerjaan yang sama. Kondisi ini lebih menonjol terjadi pada program pendidikan kecakapan hidup dalam berbagai jenis dan ragam program, seperti perbengkelan, pertanian, budidaya ikan, pengelolaan hutan tanaman produksi, jasa dan jenis kecakapan hidup lainnya..

Dampak paling nyata dari program belajar sepanjang hayat terlihat dari uraian kasus yang terjadi di PKBM Inayah Kota Makasar Provinsi Sulawesi Selatan, bahwa (1) terdapat 13 orang lulusan Paket C yang melanjutkan pendidikannya ke universitas swasta di Makasar; (2) 20 orang lulusan pendidikan life skills, 13 orang lulusan pendidikan keaksaraan dan 17 orang lulusan Paket C yang membuka usaha pembuatan VCO secara mandiri di rumahnya masing-masing (home industri); (3) 13 orang warga belajar pendidikan life skills, 8 orang lulusan pendidikan keaksaraan dan 14 orang lulusan paket C yang membuka usaha menjahit.

Dalam konteks program pendidikan kecakapan hidup, proses belajar dapat ditempuh dengan berbagai cara. Misalnya, seseorang yang ingin mempelajari teknik-teknik membuat barang kerajinan tangan, memasarkan hasil produksi, dan mengelola unit usaha maka mungkin ia dapat menempuh langkah-langkah: (a) menyaksikan atau mengamati orang lain melakukan kegiatan tertentu yang diinginkan, (b) membantu orang lain yang membuat barang atau melakukan usaha, (c) ikut serta bersama orang lain yang melakukan kegiatan, dan (d) mengerjakan sendiri pekerjaan kegiatan tertentu. Melalui salah satu atau beberapa langkah tersebut maka ia dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan atau aspirasinya untuk mencapai kepuasan dalam peningkatan diri. Aspek tingkah laku inilah yang perlu ditingkatkan ke arah yang lebih baik karena perubahan aspek tingkah laku tersebut akan mempengaruhi peningkatan taraf hidup dan kehidupan peserta didik.

Proses belajar sepanjang hayat mampu menempatkan nilai-nilai kecakapan hidup (*life skills*) sebagai muatan strategis yang terintegrasi dengan materi belajar sepanjang hayat. Nilai kecakapan hidup dan kecakapan sosial dalam dunia belajar sepanjang hayat akan sangat baik bila dikembangkan melalui sistem kemitraan (*partnership system*) dengan melibatkan orangtua, gubernur, organisasi profesi, kelompok minat dan industri. Dalam gambar berikut terlihat ada sepuluh daftar kecakapan hidup paling atraktif bagi pengembangan wawasan dan nilai belajar sepanjang hayat.

Pentingnya belajar dari dan dalam dunia kehidupan nyata tidak terbatas pada

upaya untuk memiliki dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan aspirasi saja. Lebih jauh dari itu kegiatan belajar mencakup segi-segi kehidupan yang lebih luas seperti nilai keagamaan, hubungan sosial, adat istiadat, dan norma-norma yang berkembang dalam masyarakat. Kegiatan belajar diperlukan pula untuk menyesuaikan diri dengan perubahan positif yang terus berkembang dalam kehidupan. Dengan perkataan lain kegiatan belajar sepanjang hayat adalah untuk menyiapkan diri guna mencapai kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang.

## **Temuan Penelitian**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belajar sepanjang hayat merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan pendidikan di Indonesia. Temuan ini terungkap dalam beberapa produk kebijakan pendidikan yang mengkonseptualisasi belajar sepanjang hayat menjadi prinsip dan asas penyelenggaraan pendidikan, baik pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal dalam berbagai jenis, jenjang dan program pendidikan.

Konseptualisasi belajar sepanjang hayat dalam produk kebijakan pendidikan di Indonesia, masih berupa penggalan-penggalan yang bersifat parsial dan dalam bentuknya yang beragam. Ada yang secara eksplisit menggunakan terminologi program pendidikan atau belajar sepanjang hayat, selebihnya menggunakan terminologi lain yang biasa digunakan dalam pendidikan nonformal.

Beberapa temuan penting yang berkaitan dengan konseptualisasi belajar sepanjang hayat dalam produk kebijakan pendidikan dapat digambarkan sebagai berikut:

### *1. Prinsip Belajar Sepanjang Hayat*

Prinsip belajar sepanjang hayat merupakan aspek paling krusial dalam penyelenggaraan pendidikan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik pada satuan dan program pendidikan. Karena filosofinya setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Dalam konteks penelitian ini, program belajar sepanjang hayat lebih sering diposisikan dalam kerangka berfikir jalur pendidikan, baik formal, nonformal dan informal. Belajar sepanjang hayat dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pendidikan nonformal, telah memberikan arah dan prinsip-prinsip dalam mengembangkan program pendidikan nonformal.

### *2. Jenis Program dan Satuan Pendidikan*

Kesadaran akan pentingnya belajar sepanjang hayat pada daerah-daerah yang menjadi lokasi penelitian menjadikan bervariasinya program belajar sepanjang hayat yang dikembangkan. Hal ini tidak terlepas dari peran serta para pembuat kebijakan di daerah yang melaksanakan sesuai dengan acuan kebijakan penyelenggaraan pendidikan non formal dari pusat. Keberagaman program pada dasarnya memiliki karakteristik yang hampir sama di setiap daerah yaitu pada satuan pendidikan sepanjang hayat yang diteliti (PKBM), program yang

dikembangkan relatif sama khususnya pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), antara lain: (a) Pendidikan kesetaraan meliputi program Paket A Setara SD, Paket B Setara SLTP dan Paket C Setara SMU, (b) Pendidikan keaksaraan fungsional, (c) Pendidikan Kecakapan Hidup (life skill), (d) Pengembangan Minat Baca melalui Taman Bacaan Masyarakat, Perpustakaan Komunitas; (e) Kursus dan Pelatihan Keterampilan, (f) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); (g) Pendidikan dan Pemberdayaan Perempuan; (h) Pendidikan Kewirausahaan/Kelompok Belajar Usaha; (i) Pendidikan Kepemudaan, Rekreasi dan Olahraga/Kelompok Belajar Olahraga (KBO); (j) Pengembangan Program Magang.

### *3. Peranserta dan Kemitraan Pemerintah, Lembaga Non Pemerintah, dan Masyarakat*

Pembinaan penyelenggaraan pendidikan sepanjang hayat dari pemerintah dilakukan secara terprogram dan berkesinambungan, oleh jajaran dinas pendidikan, yang berfokus pada tiga jalur pendidikan, meliputi pendidikan formal, pendidikan informal, dan non formal. Pada level provinsi yang memberikan pembinaan yaitu Dinas Pendidikan di tingkat Provinsi, sedangkan untuk tingkat Kabupaten yang memberikan pembinaan yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten. Pada Tingkat kecamatan pelaksana teknis dalam pembinaan yaitu Penilik Pendidikan baik pendidikan persekolahan maupun Pendidikan Luar Sekolah. Dalam menjalankan tugas penilik PLS dibantu oleh Tenaga Lapangan Dikmas (TLD). Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan (NGO) dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber belajar, pelaksana, dan pengguna pendidikan.

Kemitraan dalam pengembangan pendidikan sepanjang hayat dapat dinilai strategis untuk mengidentifikasi persoalan yang terjadi dan merumuskan model kerjasama yang harmonis dan strategik diantara para pelaku program. Pemberdayaan masyarakat dalam konteks peningkatan perekonomian masyarakat model kemitraan diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam program pemberdayaan masyarakat.

### *4. Struktur Kelembagaan, Anggaran, dan Ketenagaan pada Program Belajar Sepanjang Hayat*

Pengembangan dan implementasi program belajar sepanjang hayat pada jalur pendidikan nonformal dan informal diselenggarakan pada lembaga-lembaga teknis, baik pada lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, dan masyarakat secara luas. Visi kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal adalah “terwujudnya manusia Indonesia pembelajar sepanjang hayat”. Anggaran atau Pembiayaan pendidikan nonformal menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Pendidik pada program belajar sepanjang hayat harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Disamping itu tenaga



pendidik pada program belajar sepanjang hayat harus memiliki kualifikasi dan kompetensi minimum yang dipersyaratkan.

Tenaga kependidikan pada program pendidikan kesetaraan sekurang-kurangnya terdiri dari pengelola kelompok belajar, tenaga administrasi, dan tenaga perpustakaan. Sedangkan tenaga kependidikan lembaga kursus dan pelatihan keterampilan yang menuntut adanya pengelola atau penyelenggara, teknisi, sumber belajar, pustakawan, dan laboran.

#### 5. *Substansi Program Pembelajaran dan Sasaran Langsung*

Substansi pokok program belajar sepanjang hayat, terutama pada program pendidikan kesetaraan (Program Paket A, Paket B, dan Paket C) mencakup kelompok mata pelajaran sebagai berikut: Agama dan Akhlak Mulia, Kewarganegaraan dan Kepribadian, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Estetika, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Kurikulum program belajar sepanjang hayat dikembangkan prinsip-prinsip: (a) Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungan; (b) Beragam dan terpadu; (c) Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; (d) Relevan dengan kebutuhan kehidupan; (e) Menyeluruh dan berkesinambungan; (f) Belajar sepanjang hayat; (g) Seimbang antara kepentingan nasional dan daerah; (h) Tematik; (i) Partisipatif

#### 6. *Metodologi Pembelajaran dan Mekanisme Penyampaian*

Program belajar sepanjang hayat diselenggarakan dalam berbagai modus, bentuk, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta system penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan. Metode yang dipergunakan dalam program belajar sepanjang hayat disesuaikan dengan substansi materi dari program yang dikembangkan. Pada program kesetaraan metode yang dipergunakan relatif sama dengan pendidikan formal hanya memiliki beberapa perbedaan yaitu lebih banyak metoda yang dipergunakan untuk belajar mandiri karena waktu belajar yang relatif lebih singkat apabila dibandingkan dengan pendidikan formal. Adapun yang memiliki kekhasan adalah metoda yang dikembangkan untuk pendidikan keaksaraan fungsional, dimana pembelajaran dilaksanakan secara *tematik* sehingga warga belajar tidak merasa bosan dan jenuh. Sedangkan metoda yang dipergunakan untuk program *life skill* lebih banyak mempergunakan demonstrasi dan simulasi untuk materi pelajaran praktek dan ceramah untuk mata pelajaran teori. Inti pembelajaran adalah transfer dan transformasi dengan mengacu pada pola *just in time* dan *just in case*. Proses pembelajaran berbasis induktif, tematik dan berbasis kecakapan hidup melalui modus:

- 1) Belajar mandiri,
- 2) Belajar dengan tutorial tatap muka/*classroom based*,
- 3) Belajar melalui magang
- 4) Belajar secara berkelompok.

#### 7. *Jaringan antara Pembelajaran Formal, Nonformal, dan Informal*

Belajar sepanjang hayat merupakan proses kontinum dari elemen-elemen yang saling berkaitan (*interdependent*), yang dilandasi oleh kebutuhan individu dalam pendidikan sepanjang hidupnya. Proses belajar sepanjang hayat yang merentang dari pendidikan formal, non formal hingga informal. Kedudukan ketiga jalur tersebut dalam perspektif undang-undang jelas setara dan tidak menunjukkan hirarki kualitas, dari mulai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Hal-hal lain yang berkenaan dengan jaringan (*linkage*) antara pendidikan formal, nonformal, dan informal adalah program pindah jalur. Program pindah jalur dalam rangka kesetaraan merupakan hak peserta didik. Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara.

#### 8. *Penciptaan Lingkungan Belajar Sepanjang Hayat*

Dalam menciptakan lingkungan yang kondusif dalam mendukung implementasi program belajar sepanjang hayat perlu adanya peningkatan kerjasama antara pihak masyarakat, sekolah dan keluarga akan membantu seorang individu untuk belajar lebih baik selain itu adanya penilaian akan kemajuan belajar memberikan dorongan bagi individu untuk terus belajar. Lingkungan belajar yang kondusif akan sangat memengaruhi kualitas proses dan hasil belajar. Oleh karena itu, dukungan berbagai pihak mulai dari pemerintah, masyarakat, dan keluarga menjadi sebuah keniscayaan. Penciptaan lingkungan belajar yang baik, diharapkan mampu mendorong terciptanya budaya belajar. Budaya belajar dapat muncul dengan melakukan kolaborasi yang menyenangkan efektif dan cermat, sebab tujuan terpenting dari tujuan pendidikan adalah belajar bagaimana belajar..

#### 9. *Evaluasi, Akreditasi, dan Sertifikasi*

Evaluasi program belajar sepanjang hayat dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan. Akreditasi program dan satuan pendidikan sepanjang hayat dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah, dan atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi. Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai bentuk pengakuan terhadap prestasi belajar, sedangkan sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi.

Beberapa contoh implementasi program belajar sepanjang hayat yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan nonformal adalah sebagai berikut:

- 1) *Program Sekolah Lapang Akselerasi Ekonomi Produktif (SL-AEP) di Kabupaten Sukabumi*



4) *Program Pendidikan Keaksaraan Berbasis Kecakapan Hidup pada PKBM Inayah di Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala Kota Makasar.*

Program pendidikan keaksaraan di PKBM Inayah mampu menarik minat masyarakat untuk terlibat dalam proses pembelajaran, program ini juga cukup memiliki keunggulan dalam hal jenis keterampilan VCO yang diintegrasikan. Substansi pembelajaran untuk pendidikan keaksaraan tingkat dasar, yang dijadikan muatan program belajar (tahun 2009) adalah yang berkenaan dengan kesehatan lingkungan yang dielaborasi dengan pendidikan vokasional, pembuatan VCO (Virgin Coconut Oil) dan pembuatan kue-kue kering sebagai rasi belajarnya. Sedangkan, program belajar bagi warga belajar pendidikan keaksaraan tingkat lanjutan, adalah menjahit dan pengemasan serta teknik pemasaran VCO.

5) *Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Bina Ilmu di Ungaran Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah.*

Program Pendidikan Anak Usia dengan besaran satuan pendidikan kelompok bermain dan taman penitipan anak. Namun demikian upaya perluasan di setiap daerah semakin dikembangkan, misalnya dengan memperkuat posyandu untuk kemudian ditingkatkan menjadi Pos PAUD, penguatan lembaga sosial lainnya yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan anak usia dini; contoh paling mutakhir dari penyelenggaraan program PAUD adalah program PAUD yang diselenggarakan oleh PKBM Bina Ilmu di Kabupaten Semarang. Program PAUD Bina Ilmu termasuk program yang cukup baik dan bermutu, mengingat kelengkapan dari beberapa komponen pendukungnya, dilihat dari perspektif pengelolanya, pamong belajar/fasilitator/tutor, program belajar, sarana dan prasarana, hasil belajar, warga belajar, rasi belajar, kelompok belajar, panti belajar, ketersediaan dana belajar.

6) *Taman Bacaan Masyarakat/Perpustakaan Komunitas di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.*

TBM sebagai lembaga yang lahir dari dan untuk masyarakat merupakan potensi dalam memberdayakan warga belajar khususnya dan masyarakat umum dalam memperoleh informasi dan pengetahuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Program ini juga masih menjadi domain pusat, di mana program yang diluncurkan belum mendapatkan dukungan yang optimal dari pemerintah daerah, meskipun pada tahun 2007 pemerintah pusat telah memberikan stimulan berupa mobil untuk taman bacaan kepada pemerintah kabupaten/kota, di mana dana operasionalnya hendaknya dialokasikan oleh APBD kabupaten/kota. Di beberapa daerah yang menjadi lokasi penelitian, program pengembangan budaya baca ini lebih dikenal dengan nama yang berbeda, yaitu perpustakaan komunitas.

7) *Program Pendidikan dan Pemberdayaan Perempuan yang Rentan Masalah Sosial dan Ekonomi.*

Program pendidikan dan pemberdayaan perempuan, merupakan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan perempuan,

khususnya mereka yang termarginalkan, baik karena faktor kultur maupun struktur. Program pendidikan perempuan difokuskan pada dua hal, yakni peningkatan kesadaran perempuan akan hak-hak dasar kemanusiaan (HAM) dan peningkatan kemampuan/kecakapan perempuan yang dapat mendorong perempuan dapat berkiprah secara maksimal dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan bangsa. Program pendidikan perempuan sementara ini masih menjadi domain pemerintah pusat, dalam arti bahwa pemerintah daerah belum ada yang menganggarkan dana untuk program yang sama dengan pemerintah pusat.









7. Keterbatasan jumlah dan kelompok responden yang dipilih dan berpartisipasi didalam penelitian ini ini, perlu dikembangkan lebih banyak dan bervariasi untuk mewakili berbagai kelompok berdasarkan letak geografis maupun beragam kelompok masyarakat pengguna lulusan satuan dan program belajar sepanjang hayat termasuk dunia usaha dan dunia industri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Barbara, M. (1998). *Practice Guide Assesing Lifelong Learning Technology (ALL-TECH): A Guide for Choosing and Using Technology for Adult Learning*. NCAL Report.
- Blakely, R. (1972). *The School and Continuing Education*. (Paris UNESCO.
- Bogdan, RC dan Biklen, SK. (1982). *Qualitative Research for Education: Introduction to Theory and Methods*. Boston: Allyn and Bacon.
- Cropley, A.J. (1972). *Lifelong Education: A Psychological Analysis*. UNESCO.
- \_\_\_\_\_(1974). *Pendidikan Seumur Hidup: Suatu Analisis Psikologis*. Penyunting: Sardjan Kadir. Surabaya: Usaha Nasional.
- Dave, R.H. (1973). *Foundation of Lifelong Education*. Oxford: Pergamon.
- Delors, J. and Team. (1998). *Learning Tresure Within*. New York: UNESCO.
- Depdiknas. (2005). *Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: Depdiknas.
- \_\_\_\_\_. (2003). *Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdiknas.
- \_\_\_\_\_, (2005). *Rencana Strategis (Renstra) Departemen Pendidikan Nasional 2005-2009*. Jakarta: Depdiknas
- \_\_\_\_\_, (2007), *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket Paket B, dan Program Paket Paket C*. Jakarta: Depdiknas.
- \_\_\_\_\_, (2006). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan*; Jakarta: Depdiknas
- \_\_\_\_\_, (2008). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 03 Tahun 2008 tentang Standar Proses untuk Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket Paket B, dan Program Paket Paket C*. Jakarta: Depdiknas
- Ditjen Pendidikan Nonformal dan Informal. (2005). *Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal*. Jakarta: Ditjen PNFI.

- Duke, C. (1976). *Australian Perspectives In Lifelong Education*. Melbourne: Australian Council For Education Research.
- Dumadezier, J. (1991). *The School and Continuing Education*. Paris: UNESCO.
- European Commission. Directorate General for Education and Culture. (2002). *European Report on Quality Indicators of Lifelong Learning*. Brussel.
- Elliot, G. (1999). *Lifelong Learning: The Politics, Practice and Program*. Canada: APEC.
- Field, J. (2000). *Lifelong and The New Educational Order*. UK and Sterling: Trentham Books.
- Hatton, M.J. (1977). *Lifelong Learning: Policies, Practices, and Programs*. Canada: APEC Publication
- Lengrand, P. (1970). *An Introduction in Lifelong Education*. Paris: UNESCO.
- Longworth, N & Davies, W.K. (1996). *Lifelong Learning*. London: Kogan Page Limited.
- Mansell, R dan When, U. (1998). *United Nations Commission on Science and Technology Development*. UNSCTD.
- Miarso, Y. (2004). *Menyemai Benih Teknologi Pendidikan*. Jakarta: Pustekkom Diknas & Kencana.
- Morrison, D. M., Mohaski, K. & Cotter, K. (2005). *Instructional Quality Indicators Research Foundations*. Cambridge, MA: Conect.
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (2004). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat (2004-2009)*. Bandung.
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (2004). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah (2004-2009)*. Semarang.
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. (2004). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat (2004-2009)*. Pontianak.
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. (2004). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan (2004-2009)*. Makassar.
- Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. (2004). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan (2004-2009)*. Palembang.
- Sudjana, H.D. (2004). *Pendidikan Non Formal: Wawasan, Sejarah Perkembangan, Filsafat, Teori Pendukung, Asas*. Bandung: Falah Production.
- Wang, CY. (1997). *Advancing Lifelong Learning through Adult Education in Chinese Taipei*. In Hatton, M.J.